

KETIMPANGAN WILAYAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2018 MELALUI PENDEKATAN INDEKS WILLIAMSON

Rian Destiningsih

Universitas Tidar

Andhatu Achsa

Universitas Tidar

Rr. Retno Sugiharti

Universitas Tidar

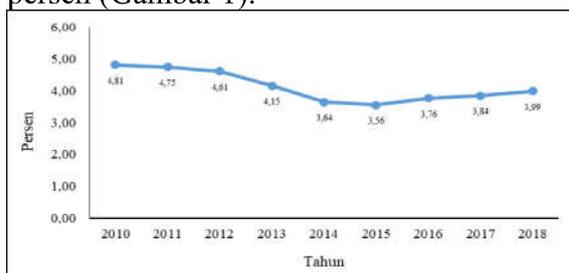
ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan apakah hipotesis Kuznets tentang U terbalik berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan Indeks Williamson dan korelasi Pearson. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah tergolong ketimpangan sedang dan hipotesis Kuznets berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.

Kata kunci: *ketimpangan, williamson index, kuznets*

PENDAHULUAN

Besaran pendapatan perkapita menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Selain itu, pendapatan perkapita juga memberikan gambaran pendapatan dan standar hidup (*standard of living*) rata-rata penduduk karena secara matematis pendapatan perkapita adalah pembagian antara pendapatan suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun selama satu periode yang biasanya satu tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung stagnan yaitu pada kisaran 3 persen (Gambar 1).



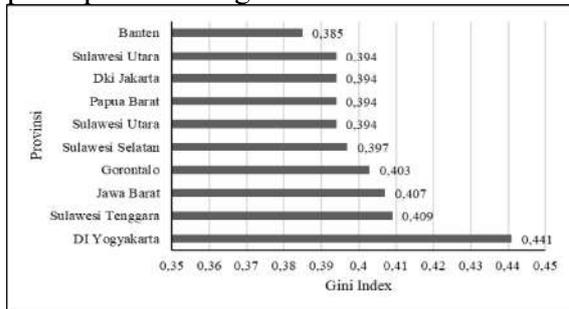
Gambar 1. Pertumbuhan PDB Perkapita Indonesia Tahun 2010-2018

Sumber : World Bank, 2019

Masalah utama terkait pendapatan yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan salah satunya dapat diukur dengan indeks gini, perhitungan indeks gini pada dasarnya menggunakan data jumlah rumah tangga dan jumlah pendapatan rumah tangga. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi dengan gini index tertinggi dari provinsi-provinsi di seluruh Indonesia tahun 2018 (Gambar 2). Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan kesejahteraan penduduknya meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat sejak tahun 2015 hingga 2018, dimana masing-masing nilainya 4,95 persen, 5,05 persen, 5,26 persen dan 6,20 persen di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut belum selaras dengan distribusi pendapatan, dilihat dari distribusi

pendapatan DIY tergolong ketimpangan pendapatan sedang.



Gambar 2. Peringkat Sepuluh Provinsi Dengan Nilai Indeks Gini Tertinggi di Indonesia Tahun 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2019

Posisi strategis DIY diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan kabupaten/kota. Semakin tinggi pendapatan suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya, atau sebaliknya yaitu semakin rendah pendapatan perkapita suatu daerah maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah tersebut.

Pendapatan merupakan salah satu gambaran standar hidup perekonomian menjadi objek penting untuk diteliti. Salah satu yang menjadi alasan mengenai rendahnya pendapatan suatu wilayah (Iqbal, Din, & Ghani, 2012; James E. Anderson, 1967; Misini & Badivuku-Pantina, 2017).

Ginting (2015) mengemukakan bahwa ketimpangan Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Kemudian (Aprianoor & Muktiali, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa di Provinsi Jawa Barat termasuk ketimpangan tinggi. Selanjutnya Mauliddiyah (2014) menyatakan bahwa hipotesis Kuznets terjadi di Kota Batu, artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi disertai dengan naiknya ketimpangan. Hipotesis Kuznets tentang U-terbalik juga berlaku di Provinsi Jawa Timur dan ketimpangan pembangunan Provinsi Jawa

Timur tergolong rendah Nurhuda (2013). Pada sisi lain, Hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Kalimantan Timur atau dengan kata lain ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan pembangunan menurun (Yuliani, 2015).

Ketimpangan wilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan lainnya. Dari beberapa kajian literatur diatas, terlihat bahwa beberapa wilayah menemukan hasil yang berbeda-beda, selain dari faktor yang mempengaruhi yang berbeda di masing-masing wilayah. Perbedaan periode juga dapat memberikan hasil yang berbeda, hal tersebut dikarenakan setiap periodenya pemerintah melalui berbagai kebijakannya dipastikan berusaha mengurangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan apakah Hipotesis Kuznets tentang U terbalik berlaku di DIY tahun 2010-2018.

LANDASAN TEORI

Ketimpangan wilayah merupakan ketimpangan yang dikaitkan dengan distribusi pendapatan masyarakat dan pembangunan antar wilayah (Sirojuzilam, 2005). Menurut Kutscherauer, dkk (2010), ketimpangan wilayah yaitu perbedaan karakteristik, fenomena atau kondisi lokasi dan terjadi minimal diantara dua entitas dari struktur wilayah.

Ketimpangan wilayah dapat dipengaruhi oleh migrasi tenaga kerja, migrasi kapital antar wilayah tak seimbang, aglomerasi wilayah perkotaan dan kurangnya keterkaitan antar wilayah (Muta'ali, 2015). Ketimpangan pembangunan juga bisa dipengaruhi

perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi yang nantinya terjadi perbedaan pendapatan antar wilayah (Yeniwati, 2013).

Myrdal dalam Jhingan (2003), ketimpangan pembangunan terkait dampak balik atau *backwash effect* (dampak balik akibat perubahan yang merugikan dari ekspansi ekonomi wilayah karena sebab dari luar wilayah tersebut) dan dampak sebar atau *spread effect* (dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya). Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Hal inilah menurut Myrdal yang menjadi penyebab utama ketimpangan pembangunan, dimana semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan dan menyebabkan ketimpangan pembangunan. Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2003), ketimpangan dalam tahap awal pembangunan cenderung besar, kemudian tahap selanjutnya menjadi kecil atau menuju pemerataan. Ketimpangan wilayah dapat diukur dengan perhitungan Indeks *Economic Distance*, Indeks Theil, Indeks Enthropi, Indeks Pemerataan Dan Indeks Williamson.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan analisis data sekunder. Cakupan wilayah yaitu Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber, Jenis, dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data sekunder bersifat

makro di regional Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat makro, antara lain: Produk Domestik Regional Bruto Perkapita kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduk kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode studi dokumentasi yakni mempelajari dokumen dan laporan tahunan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Ketimpangan wilayah diukur dengan indeks Williamson. Indeks Williamson berguna untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan membandingkan PDRB perkapita dengan jumlah penduduk wilayah tersebut (Muta'ali, 2015).

Adapun rumus indeks Williamson dibawah ini (Sjafrizal, 2008; Sjafrizal, 2018; Kuncoro, 2004; Muta'ali, 2015).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan:

- IW : Nilai Indeks Williamson
Y_i : PDRB Perkapita kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
Y : PDRB Perkapita rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta
f_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
n : Jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kriteria ketimpangan :

1. Bila IW nilainya 0,1-0,35, artinya ketimpangan ringan
2. Bila IW nilainya 0,35-0,5, artinya ketimpangan sedang
3. Bila IW nilainya >0,5, artinya ketimpangan besar.

Selanjutnya analisis yang digunakan adalah analisis korelasi pearson sebagai pembuktian Kurva Kuznets dengan melihat hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah (indeks Williamson). Nilai korelasi (r) antara -1 sampai +1.

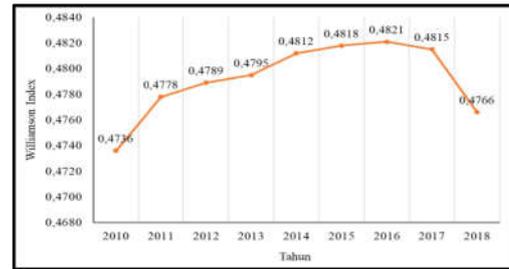
Kriteria r :

1. Bila r mendekati 0, maka hubungan antara ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali.
2. Bila nilai r mendekati 1 maka hubungan antara ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi dikatakan positif dan sangat kuat.
3. Nilai r positif, maka arah hubungan ketimpangan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi satu arah atau nilai ketimpangan wilayah naik maka nilai pertumbuhan ekonomi juga ikut naik.
4. Jika r negatif, maka hubungan antara dua variabel berlawanan, nilai ketimpangan wilayah naik maka nilai pertumbuhan ekonomi juga ikut turun atau sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Ketimpangan Wilayah

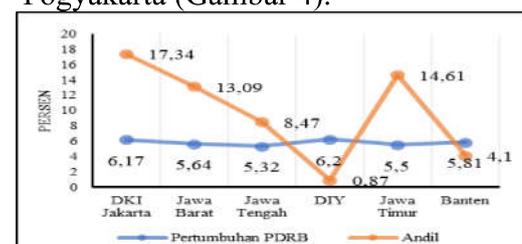
Indeks Williamson dengan nilai rentang nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai Indeks Williamson maka semakin tinggi ketimpangan wilayah. Capaian pertumbuhan ekonomi yang tidak sama antar wilayah menjadikan permasalahan ketimpangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDRB, sedangkan kesejahteraan masyarakat diukur dengan besaran PDRB perkapita. Tingginya PDRB perkapita mungkin dinikmati sebagian kecil masyarakat (Tambunan, 2001).



Gambar 3. Indeks Williamson Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018

Indeks Williamson di DIY menunjukkan bahwa selama sembilan tahun terakhir, indeks Williamson terus cenderung mengalami peningkatan namun terjadi penurunan di tahun 2018. Indeks Williamson DIY tergolong ketimpangan sedang dengan nilai Indeks Williamson rata-rata sekitar 0,4792 selama sembilan tahun terakhir. Angka tersebut hampir mendekati ketimpangan wilayah yang tergolong berat, ketimpangan berat apabila suatu wilayah memiliki Indeks Williamson mencapai lebih dari 0,50.

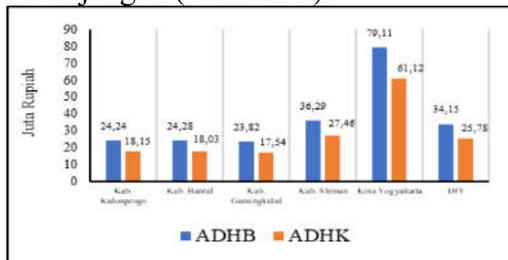
Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada peringkat ke-21 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku secara nasional, sedangkan bila dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa DIY termasuk level terendah serta kontribusi PDRB DIY terhadap total PDRB 34 provinsi tahun 2018 tercatat sebesar 0,87 persen. Andil PDRB terbesar tahun 2018 disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta dan yang terendah oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Gambar 4).



Gambar 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Andil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Hal tersebut diperkuat dengan PDRB perkapita DIY yang menempati peringkat sembilan terendah dari seluruh provinsi di Indonesia. Untuk PDRB perkapita kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta juga terjadi kesenjangan (Gambar 5).



Gambar 5. PDRB Perkapita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Hal lain yang memperkuat temuan IW diatas adalah Rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR merupakan ukuran yang menyatakan besaran tambahan modal untuk meningkatkan satu satuan output dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin kecil nilai ICOR menunjukkan bahwa kemampuan investasi untuk menghasilkan output semakin besar. Angka ICOR ideal (efisien) berada pada kisaran nilai 3-4 (Widodo, 1990). Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ICOR di atas level lima pada tahun 2014-2017 dan pada tahun 2018 nilainya menurun menjadi 4,96, artinya untuk meningkatkan output sebesar satu satuan pada tahun 2018 membutuhkan investasi sebesar 4,96 satuan. Penurunan nilai ICOR menunjukkan investasi pada tahun 2018 lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ketimpangan selama 2017-2018 yang dipengaruhi oleh aktivitas investasi di wilayah pinggiran DIY terutama di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Di wilayah selatan DIY, percepatan

pembangunan pada Jalur Jalan Lintas Selatan. Di wilayah barat, pembangunan Bedah Menoreh yang menghubungkan Kabupaten Kulonprogo dengan kawasan strategis pariwisata Borobudur.

Dengan penyempurnaan bidang infrastruktur akan memudahkan interkoneksi antarwilayah dan diharapkan akan mendongkrak perekonomian. Dalam penelitian Sukwika (2018) menyatakan bahwa ketimpangan memiliki korelasi positif terhadap disparitas infrastruktur antar provinsi. Jika infrastruktur baik maka perekonomian juga akan mengalami peningkatan, yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan.

2. Hipotesis Kuznets

Apabila melihat Gambar 3, didapat hasil Daerah Istimewa Yogyakarta kecenderungan peningkatan ketimpangan namun kemudian mengalami penurunan ketimpangan. Hal tersebut belum membuktikan apakah hipotesis Kuznets berlaku atau tidak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hipotesis Kuznets tahap awal distribusi pendapatan cenderung memburuk dan ketimpangan akan meningkat, tahap selanjutnya ketimpangan mengalami penurunan dan pemerataan PDRB perkapita (Todaro, 2004).

Untuk mengetahui apakah Hipotesis Kuznets berlaku atau tidak di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melalui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah dengan menggunakan korelasi Pearson. Dari korelasi Pearson, diperoleh hasil bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah adalah negatif yaitu -0,73. Ini berarti

bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah (pendekatan Indeks Williamson) di Daerah Istimewa Yogyakarta, artinya apabila pertumbuhan ekonomi naik akan menyebabkan ketimpangan wilayah (pendekatan Indeks Williamson) turun. Sehingga hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2018.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018

Tahun	Ketimpangan Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi
2005	0,1085	5,46
2006	0,108	5,61
2007	0,1073	5,9
2008	0,1068	5,88
2009	0,107	5,07
2010	0,1065	6,48
2011	0,1053	6,67

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tirado (2016) tentang ketimpangan regional dan pembangunan ekonomi di Spanyol tahun 1860-2010, hasil penelitian selama seratus lima puluh tahun tersebut menunjukkan bahwa Kurva Kuznets tentang U terbalik berlaku. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda (2013), awal pertumbuhan ketimpangan memburuk, berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu saat terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan nantinya ketimpangan akan menurun lagi, kejadian tersebut terjadi berulang dan kurva membentuk kecenderungan U terbalik artinya hipotesis Kuznets berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan ketimpangan wilayah dengan pendekatan Indeks Williamson dan korelasi Pearson diketahui bahwa ketimpangan wilayah tergolong ketimpangan sedang; serta hipotesis Kuznets berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan peneliti adalah dengan menggunakan data *long term* dalam menganalisisnya.

Implikasi dan Keterbatasan

Kebijakan yang sebaiknya dilakukan adalah salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menurunkan ketimpangan. Keterbatasan penelitian ini yaitu ada alat analisis lain yang dapat mengukur ketimpangan wilayah dan variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh kepada ketimpangan wilayah di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianoor, Pritha dan Muhammad Muktiali. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*, 4(4), 484-498
- Daniel A.Tirado, Alfonso Díez-Minguela, JulioMartinez Galarraga. (2016). Regional inequality and economic development in Spain, 1860–2010. *Journal of Historical Geography*, 54, 87-98
- Ginting, Ari Mulianta. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2004-2013. *Kajian*, 20(1), 45-58
- Iqbal, N., Din, M. ud, & Ghani, E. (2012). Fiscal Decentralisation and Economic Growth: Role of

- Democratic Institutions. *The Pakistan Development Review*, 51(3), 173–195
- James E. Anderson. (1967). Poverty, Unemployment, and Economic Development: The Search for a National Antipoverty Policy. *The Journal of Politics*, 29(1), 70–93
- Jhingan, M.L. (2003). *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*. PT. Raya Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Kutscherauer, Alois, dkk. 2010. *Regional Disparities In Regional Development of the Czech Republic*. Ostrava: Universitas Teknik Ostrava.
- Mauliddiyah, Alfiana. (2014). Analisis Disparitas Regional Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kota Batu Tahun 2002-2012). *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)*, 6(2), 156-163
- Misini, S., & Badivuku-Pantina, M. (2017). The Effect of Economic Growth In Relation to Unemployment. *Journal of Economics and Economic Education Research*, 18(2)
- Muhammad Iqbal, Amzul Rifin, dan Bambang Juanda. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Provinsi Aceh. *Tata Loka*, 21(1), 75-84
- Muta'ali, Lutfi. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe)
- Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nurhuda, Rama, M.R. Khairul Muluk, dan Wima Yudo Prasetyo. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 110-119
- Sirojuzilam. (2005). *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Bandung.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Pranita Offset. Padang.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Sukwika, Tatan . (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130
- Tambunan, Tulus. (2001). *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Ghalia Indonesia Erlangga. Jakarta.
- Todaro, Michael P. (2004). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta.
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta
- Yeniwati. (2013). Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(3), 1-21
- Yuliani, Tutik. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur. *Journal of Economics and Policy*, 8(1), 45-53